



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Determinasi Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial terhadap Partisipasi Masyarakat

Reni Silviah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, [renisilviah5@gmail.com](mailto:renisilviah5@gmail.com)

Corresponding Author: [renisilviah5@gmail.com](mailto:renisilviah5@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Literature Review Determination of Government Policy and Social Welfare on Community Participation is a scientific article with the aim of analyzing whether government policy and social welfare have an impact on community participation. The qualitative approach method with the literature review method to explore and analyze the relationship between government policy and social welfare on community participation. The results of this article are: 1) Government policy plays a role in community participation; 2) Social welfare plays a role in community participation. Apart from these 2 exogenous variables that influence the endogenous variable, namely digital literacy, there are many other factors including socio-economic, media, democratic awareness, public trust.*

**Keywords:** *Government Policy, Social Welfare, Community Participation.*

**Abstrak:** *Literature Review Determinasi Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial terhadap Partisipasi Masyarakat adalah artikel ilmiah dengan tujuan untuk menganalisa apakah kebijakan pemerintah dan kesejahteraan sosial berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Metode pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara kebijakan pemerintah dan kesejahteraan sosial terhadap partisipasi masyarakat. Hasil artikel ini adalah: 1) Kebijakan pemerintah berperan terhadap partisipasi masyarakat ; 2) Kesejahteraan sosial berperan terhadap partisipasi masyarakat. Selain dari 2 variabel exogen ini yang mempengaruhi variabel endogen yaitu literasi digital, masih banyak faktor lain di antaranya sosial ekonomi, media, kesadaran demokrasi, kepercayaan publik.*

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah, Kesejahteraan Sosial, Partisipasi Masyarakat.*

### PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional dan daerah merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan tingkat partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dapat mempercepat

tercapainya tujuan pembangunan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesejahteraan sosial, sebagai salah satu indikator utama dalam pembangunan suatu negara, berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan sosial dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang tidak inklusif atau tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat dapat menghambat partisipasi masyarakat dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, pemahaman tentang interaksi antara kebijakan pemerintah dan kesejahteraan sosial sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis determinasi kebijakan pemerintah dan kesejahteraan sosial terhadap partisipasi masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah dan kesejahteraan sosial berperan terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan referensi dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan artikel ilmiah *literature review* sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan Pemerintah berperan terhadap Partisipasi Masyarakat?
2. Apakah Kesejahteraan Sosial berperan terhadap Partisipasi Masyarakat?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara kepercayaan publik, partisipasi politik, media sosial, dan literasi digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dari penelitian sebelumnya, teori, dan model yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil dari artikel ini berdasarkan latar belakang masalah, tujuan dan metode adalah sebagai berikut:

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat berarti masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga turut serta sebagai subjek yang memiliki suara dan kontribusi terhadap keputusan yang diambil. Arnstein dalam teorinya tentang "Ladder of Citizen Participation" mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dipahami dalam bentuk hierarki yang terdiri dari delapan tingkat. Setiap

tingkat ini menggambarkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

Dalam penelitian (Suryana., 2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut.

Indikator-indikator yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam organisasi masyarakat atau kelembagaan sosial, seperti ; 1) banyaknya masyarakat yang aktif dalam organisasi masyarakat, 2) kelompok tani, 3) lembaga kemasyarakatan, 4) forum-forum sosial lainnya.

Partisipasi Masyarakat banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, meliputi: (Uceng et al., 2019) (Pitri., Ali, H., 2022), (Maunde et al., 2021), (Sutrisno, E., 2020), (Sari, R., & Ningsih, F., 2019), (Purnama, S., & Harwati, F., 2019).

### **Kebijakan Pemerintah**

Proses pengambilan kebijakan pemerintah di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait. Berdasarkan kajian dari Mardiasmo (2016), proses pengambilan kebijakan pemerintah di Indonesia dimulai dengan identifikasi masalah yang membutuhkan perhatian. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan yang tepat melalui musyawarah atau konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program-program yang dirancang oleh pemerintah.

Sutrisno & Pratama (2019) juga menyatakan bahwa kebijakan pemerintah di Indonesia tidak hanya berfokus pada proses perumusan, tetapi juga pada implementasi yang melibatkan berbagai lembaga negara serta masyarakat. Proses ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan lembaga untuk menjamin keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan.

Indikator kebijakan pemerintah adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan pemerintah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun pembangunan infrastruktur. Beberapa indikator yang sering digunakan dalam menilai kebijakan pemerintah di Indonesia mencakup efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Kebijakan Pemerintah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, meliputi: (Pitri., Ali, H., 2022), (Maunde et al., 2021), (Sutrisno, E., 2020), (Sari, R., & Ningsih, F., 2019), (Purnama, S., & Harwati, F., 2019).

### **Kesejahteraan Sosial**

Menurut Sen (1999) dalam teori kapasitasnya, kesejahteraan sosial tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan kebebasan individu untuk mengakses berbagai peluang yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan hidup secara mandiri. Dalam (Suharto & Ningsih, 2020), kesejahteraan sosial mencakup upaya untuk mencapai kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak, memiliki peluang untuk berkembang, dan hidup dengan martabat. Kesejahteraan sosial juga diukur melalui indikator seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan yang memadai, akses terhadap layanan kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Mardiasmo (2016) menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan di mana individu dapat mengakses layanan sosial dan ekonomi yang membantu mereka untuk berkembang dan mencapai kualitas hidup yang baik. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Indikator kesejahteraan sosial merujuk pada ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kelompok dalam sebuah negara tercapai. Beberapa indikator utama yang sering digunakan dalam menilai kesejahteraan sosial mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, meliputi: (Nabillah & Ali, H., et al, 2023), (Lasari, D., & Ali, H., 2024), (Haryani, L., & Rachmawati, F., 2020), (Rachmawati, E., & Anwar, S., 2019), (Situmorang, M., & Harsono, A., 2021).

## **Pembahasan**

### **a) Peran Kebijakan Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat**

Kebijakan pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik itu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang inklusif dan responsif dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Salah satu tujuan utama kebijakan pemerintah adalah menciptakan sistem yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat memungkinkan individu atau kelompok untuk memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang transparan dan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Salah satu contoh kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat adalah penerapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan prioritas pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Kebijakan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga merupakan contoh kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program sosial. Program ini mengharuskan penerima manfaat untuk memenuhi beberapa kriteria atau mekanisme tertentu yang membutuhkan partisipasi aktif mereka, misalnya dengan berpartisipasi dalam pelatihan atau penyuluhan terkait kesehatan dan pendidikan.

Riset ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Pitri., Ali, H., 2022), (Maunde et al., 2021), (Sutrisno, E., 2020), (Sari, R., & Ningsih, F., 2019), (Purnama, S., & Harwati, F., 2019).

### **b) Peran Kesejahteraan Sosial terhadap Partisipasi Masyarakat**

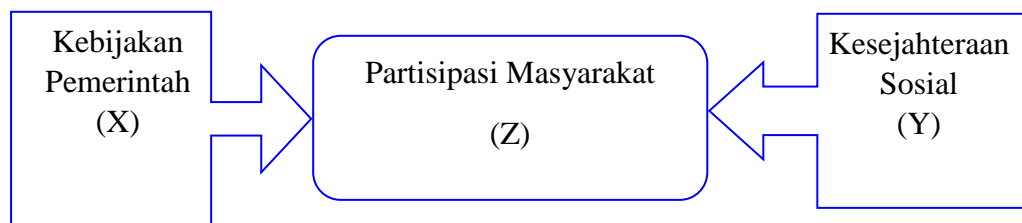
Kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Kesejahteraan sosial mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sementara partisipasi masyarakat berfokus pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pembangunan.

Salah satu indikator kesejahteraan sosial yang paling jelas adalah akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, individu menjadi lebih terinformasi dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Sutrisno & Pratama (2019) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa masyarakat yang memperoleh pendidikan yang layak cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, karena mereka merasa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan publik yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Riset ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Lasari, D., & Ali, H., 2024), (Haryani, L., & Rachmawati, F., 2020), (Rachmawati, E., & Anwar, S., 2019), (Situmorang, M., & Harsono, A., 2021).

### CONCEPTUAL FRAMEWORK

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh kerangka berfikir artikel seperti dibawah ini.



**Figure 1. Conceptual Framework**

Dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat (Z) yaitu diantaranya:

- a) Media : (Ali. H, & Saputra., 2024), (Ali. H, 2023), (Khumairoh, 2021), (Fahrudin, 2013), (Anshori, 2019).
- b) Kesadaran Demokrasi : (Ali, H., Salam, N. F. S., & Rifai, A. M., (2021), (Syarbaini, 2016), (Yuniarto, 2020), (Bramantyo et al., 2020).
- c) Sosial Ekonomi : (Astuti, 2016), (Kurniawan, 2015), (Judijanto et al., 2024), (Sastrawati et al., 2020), (Syarif, 2016).
- d) Kepercayaan Publik : (Ali, H., & Hernandez, F., 2024), (Ali, H., & Qibtiyana, M., 2024), (Ali, H., 2021), (E Alfian, 2020), (LR Andika, 2018).

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial berperan dalam Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan pertanyaan artikel maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Kebijakan publik berperan terhadap partisipasi masyarakat ; 2) Kesejahteraan sosial berperan terhadap partisipasi masyarakat

### REFERENSI

Hasan, A., & Surya, S. (2020). *Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Kebijakan Sosial, 8(1), 45-59.

Hadi, M. (2019). *Kebijakan Sosial dan Dampaknya terhadap Partisipasi Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, 6(3), 203-210.

- Haryani, L., & Rachmawati, F. (2020). *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Desa*. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(3), 72-85.
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DtkS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 12-22.
- Lestari, S., & Iskandar, S. (2018). *Pengaruh Pendidikan dan Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Studi Pembangunan*, 11(1), 42-59.
- Mardiasmo, D. (2016). *Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 101-114.
- Nabillah, J. L., Saputra, R., Ali, H., & Mahaputra, M. R. (2023). Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 1(4), 140-152.
- Rachmawati, E., & Anwar, S. (2019). *Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perdesaan*. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14(4), 99-113.
- Sari, R., & Ningsih, F. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Pemerintah Desa: Studi Kasus pada Desa X*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-58.
- Suryana, Y. (2017). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 124-132.
- Sutrisno, E., & Pratama, M. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Pembangunan Daerah di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 120-135.
- Sutrisno, E. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah: Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 18(2), 102-116.
- Situmorang, M., & Harsono, A. (2021). *Keterlibatan Masyarakat dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Analisis Kasus Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)*. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 20(2), 85-98.